II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment dalam Bahasa inggris diterjemahkan sebagai pemberdayaan dalam Bahasa Indonesia. Maka definisi kerja pemberdayaan seharusnya dirumuskan sebagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan/daya (power) pihak-pihak yang tidak atau kurang berdaya. Harus dipahami sebagai upaya untuk:

1. Memberikan kekuatan/daya (power) kepada seseorang individu atau kelompok lain, dan
2. Membiarkan mereka menguasai dan menggunakan kekuatan/daya (power) tersebut di tangan mereka untuk tujuan dan kepentingan mereka.

Pemberdayaan juga bermakna sebagai upaya distribusi-ulang (redistribusi) kekuatan/daya (power) dari pihak yang memilikinya kepada pihak yang tidak atau kurang memiliki. Karena itu, suka atau tidak suka, pemberdayaan selalu mengandung pengertian:

1. Pengurangan atau pemindahan daya (power) atau upaya melakukan disempowerment/less empowering pihak-pihak yang memiliki kekuatan/daya (power),
2. Penyerahan/penambahan daya (power) kepada pihak-pihak yang diberdayakan (empowerment).

Hal tersebut tentu saja tidak selalu disukai oleh berbagai pihak, termasuk pihak-pihak yang mengaku diri sebagai pemberdaya. (Sembiring, 2003)

pusat (BAPPENAS) maupun di daerah (BAPPEDA) sehingga dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelembagaan perencanaan parsipatiif.

Satu-satunya instrumen pengorganisasi yang paling efektif adalah pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif mempersyaratkan penerapan langkah-langkah pokok siklus/daur pembangunan (siklus/daur proyek) sebagai berikut:

- Analisis masalah atau penemu-kenalan masalah secara partisipatif,
- Perumusan tujuan dan sasaran secara partisipatif,
- Penetapan prioritas alternatif tujuan dan sasaran secara partisipatif,
- Perumusan rencana tindak (action plan) secara partisipatif,
- Pelaksanaan kegiatan nyata dengan mengerahkan dan segala sumber-daya yang dimiliki,
- Pemantauan dan evaluasi keberhasilan dan kegagalan secara partisipatif sebagai basis perencanaan tindakan lebih lanjut. (Sembiring, 2003)

Menurut Marzali (2003), Tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat desa agar ikut serta dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara:

a. Learning process (learning by doing); proses kegiatan dengan melakukan aktivitas proyek dan sekaligus mengamati, menganalisa kebutuhan dan keinginan masyarakat.

b. Institutional development; melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Karena institusi atau pranata sosial masyarakat merupakan daya tampung dan daya dukung sosial.

c. Participatory; cara ini merupakan suatu pendekatan yang umum dilakukan untuk dapat menggali need yang ada dalam masyarakat.

Pendekatan partisipatif sebenarnya bukan gagasan baru, tetapi semakin menjelang era 80-an setelah chambers menuliskan tentang Rural Development: Putting the last first (maksudnya mulailah pembangunan desa...
1. Dianggap sebagai agen atau pelaku kegiatan pembangunan lokal dalam satu kawasan tertentu yang diperkirakan dapat diajak berjejaring dan bekerjasama, sosialisasi ide dan gagasan kepada tokoh-tokoh kelompok. **Langkah Kedua** membangun jaringan kerja antar kelompok dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan potensi sumber daya manusia dan mendorong pemerintah agar bertanggungjawab kepada warganya dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. **Langkah Ketiga**, identifikasi perumusan isu dan skope kerja. Pada tahap ini pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada isu, lokasi dan spasial sehingga dapat diperoleh isu strategis di tingkat komunitas, tokoh-tokoh atau stakeholder. Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi tawar komunitas dengan komunitas lain (Nasirin Hasan, 2007)

2.3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan, dalam rangka mengantisipasi kebijaksanaan desentralisasi dengan menitikberatkan otonomi daerah pada tingkat II, maka perlu diperoleh gambaran yang jelas dan akurat mengenai peran serta atau partisipasi masyarakat, rakyat harus dilibatkan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan (Untuk Muhdiarta, http://digilib.itb.ac.id, 2001)

Komponen yang dianggap mempengaruhi partisipasi adalah keterlibatan masyarakat meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan serta kemampuan dan kesediaan masyarakat itu sendiri. Faktor lain yang tidak kalah penting yaitu kemampuan organisasi dalam mengorganisir masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan dan interaksi komunikasi anggota masyarakat, artinya semakin tinggi kemampuan organisasinya semakin banyak warga yang terlibat, semakin tinggi interaksi komunikasi masyarakat semakin tinggi partisipasi yang terjadi. (Ali Nurdin, http://digilib.itb.ac.id, 2005)

masyarakat dan perubahan pola pikir masyarakat tidak dapat dilakukan sekali jalan melainkan harus secara terus menerus minimal 4 tahun berjalan, dengan asumsi terdapat fase perkembangan dalam setiap tahun pada kegiatan program pemberdayaan masyarakat berupa: (1) Fase Persiapan, (2) Fase Penumbuhan, (3) Fase Pengembangan dan (4) Fase Kemandirian.

Penilaian tentang kemandirian dirasakan perlu untuk membuat rencana program pemberdayaan komunitas untuk tahapan berikutnya, efefisiensi biaya yang berhubungan dengan aras kemandirian.

2.4. Peningkatan Taraf Hidup dan Kemajuan Pola Pikir

Johan Purnama, 2008, mengatakan bahwa kemajuan status dan posisi ketahanan pangan yang dicapai oleh peserta dan penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya diukur dari beberapa indikator kemandirian. Indikator ini dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu: (1) Indikator kemajuan taraf kehidupan (livelihood), dan (2) Indikator kemajuan pola pikir (mindset).

Pemilihan dua indikator ini didasari pemikiran bahwa pada dasarnya program pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan status ketahanan secara holistik dan komprehensif yang tidak hanya meliputi peningkatan di bidang kesejahteraan (fisik) tetapi juga meliputi kemajuan kapasitas manusia yang ditunjukkan melalui perkembangan pola pikir yang positif.

Indikator kemajuan taraf kehidupan (livelihood) dikelompokkan sebagai indikator yang bersifat fisik (tangible) atau indikator-indikator yang dapat diukur secara kuantitatif. Indikator ini akan menggambarkan kemajuan fisik status ketahanan pangan yang antara lain diukur melalui beberapa sub indikator yaitu:

1. Pendapatan,
2. Kesempatan kerja,
3. Konsumsi pangan,
4. Sanitasi dan kebersihan

Sementara indikator kemajuan pola pikir (mindset) dikelompokkan sebagai indikator yang bersifat bukan fisik (intangible), atau indikator-indikator yang
1. Market driven, selalu berfokus pada upaya mempertemukan sisi penawaran dan permintaan;
2. Inclusive, mencakup tidak hanya perusahaan berskala kecil menengah saja tetapi juga perusahaan besar dan lembaga pendukung;
3. Collaborative, selalu menekankan solusi kolaboratif pada isu-isu daerah dari seluruh stakeholder;
4. Strategic, membantu stakeholder menciptakan visi strategis daerah yang menyangkut ekonomi;
5. Value-creating, mengupayakan penciptaan atau peningkatan nilai tambah pada daerah.

(http://www.corebest.net/teori_model_metoda_dan_teknik_implementasi.htm, 2006).

Pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pada tingkat lokal dengan mengembangkan sumber daya lokal yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.

2.6. Corporate Social Responsibility

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada pasal 74 ayat 1 dinyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidangi dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat 2 berbunyi tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan mematuhan kepatutan dan kewajaran. Ayat 3 menggariskan perseroan yang tidak pelaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(mind-set) yang berkembang adalah suatu tujuan yang tidak dapat ditinggalkan. (Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat, 2008).

2.7.2. Membangun Jaringan

Dalam tahap lanjutan perkembangan komunitas menghasilkan kegiatan-kegiatan produktif yang menghasilkan produksi dari setiap unit usaha. Usaha yang berkembang ini mempunyai gerakan yang terbatas apabila komunitas tidak dapat membuka jaringan di dalam komunitas itu sendiri dan antar komunitas lainnya, dan dalam hal ini terbukanya jaringan kerja antara komunitas dan perusahaan yang ada di sekitar wilayah komunitas dapat dijadikan daya dukung bagi kemajuan dan keberadaan komunitas. Terbukanya akses jaringan seperti pasar dan permintaan mendorong pengembangan usaha komunitas baik ragam jenis usaha yang ada mendorong peningkatan produksi secara kualitas maupun kuantitas. Dampak yang tercipta adalah kemandirian komunitas.

2.7.3. Kemandirian Komunitas

Kemandirian komunitas merupakan output dari program pemberdayaan masyarakat. Kemandirian komunitas ditandai dengan munculnya ciri-ciri berdaya dalam suatu komunitas, yaitu:

1. Mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, merumuskan serta menetapkan prioritasnya
2. Mampu merumuskan alternatif jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut
3. Mampu mengorganisasikan diri, sebagai salah satu cara penanggulangan secara bersama
4. Mampu mengembangkan aturan main, nilai, norma yang disusun, disepakati serta dipatuhi bersama
5. Mampu memperluas kerjasama serta mampu menjalin ‘kemitraan’ yang setara